BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren dengan melakukan upaya non penal yaitu sosialisasi ke pesantren, penyampaian di radio dan media sosial, meningkatkan keamanan dan pengawasan, pendampingan psikologis dan sosial untuk korban, penguatan kelembagaan pesantren dan upaya penal yaitu menerima laporan, konseling, visum et repertum, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas dan barang bukti
2. Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren diantaranya terdapat 2 (dua) faktor internal dan eksternal.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Kepolisian Resor Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak pesantren yang ada di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi untuk bersama-sama menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.

2. Menambah personil penyidik untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus.
3. Meningkatkan pengetahuan penyidik dengan melakukan pelatihan terhadap personal dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
4. Seharusnya pihak pesantren meningkatkan pengawasan terhadap guru maupun santri/santriwati dalam pergaulan dan lingkungan dengan memasang CCTV di area-area yang rentan terjadi kejahatan serta memberikan pemahaman agar terhindar dari perbuatan yang akan merusak masa depan. Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan tindakan kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren dapat teratasi dengan baik.
5. Masyarakat sekitar harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan yang berada di lingkungan mereka maupun diluar lingkungan mereka, dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat atau mendengar adanya tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
6. Orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anak mereka.
7. Pihak pesantren perlu mengambil langkah yang lebih selektif dalam proses rekrutmen ustad dan ustadzah untuk memastikan kualitas pengajaran dan pembinaan yang diberikan kepada santri. Salah satu cara

yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan psikolog dalam proses seleksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Munir Mulkhan, 1994, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Sipress, Yogyakarta
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP BARU)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta.
- Mujamil Qomar, 1996, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Erlangga, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. 242
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zuhairi Misrawi, 2010, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebagsaan*, Kompas, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Sumber Lain

- Agus Dastam dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.
- Humas FHUI, 2024, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses 2 November 2024 Pukul 13:00 WIB.
- M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi, 2024, Analisis Yuridis Pengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2.
- Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 No. 3.
- Sumbar Kita, 2024, *Awal Mula Terungkap Kasus Oknum Guru di Ponpes MTI Canduang Agam Sodomi Puluhan Santri*, <https://sumbarkita.id/awal-mula-terungkap-kasus-oknum-guru-di-ponpes-mti-canduang-agam-sodomi-puluhan-santri/> , diakses 19 Oktober 2024 Pukul 22:00 WIB.
- Humas FHUI, 2024, *Bahaya Dampak Kekerasan Seksual* <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses 2 November 2024 Pukul 13:00 WIB.
- Wordpress, *Kepolisian Resort Bukittinggi* <https://resbukittinggi.wordpress.com/> , diakses 3 November 2024 Pukul 20:00 WIB.